

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA MELALUI SOSIALISASI KOLABORATIF BPBD WONOSOBO DI DESA DERONGISOR

Arinda Ramadani, Khoerunnissa Fania Kamalia, Ifah Kholidiyyah, Diva nur Faizah, Alfiatun Nisa, Rizal Abdi Firmansyah, Abdurrahman, Moh. Agil, Raynaldo Rifqi Erlangga

UIN Saizu Purwokerto arindani149@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia, di mana tanah longsor menjadi ancaman signifikan bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa. Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, termasuk wilayah dengan risiko longsor tinggi yang ditandai oleh kondisi geografis perbukitan dan curah hujan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi kolaboratif bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wonosobo. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dan strategi *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR). Kegiatan meliputi pemetaan aset sosial, penyusunan peta rawan bencana berbasis dusun, perencanaan jalur evakuasi, serta simulasi tanggap darurat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mitigasi bencana, serta terbentuknya komitmen perangkat desa untuk mengembangkan sistem kesiapsiagaan lokal melalui pembentukan tim relawan. Kolaborasi dengan BPBD memperkuat legitimasi kegiatan sekaligus membuka peluang keberlanjutan program dalam dokumen perencanaan desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi juga menumbuhkan budaya sadar bencana yang menjadi fondasi bagi pengembangan sistem tanggap darurat desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci : mitigasi bencana, pemberdayaan masyarakat, tanah longsor, ABCD, BPBD

Abstract

Indonesia is one of the most disaster-prone countries in the world, where landslides pose a significant threat to community safety and the sustainability of rural development. Derongisor Village, located in Mojotengah Subdistrict, Wonosobo Regency, is categorized as a high-risk area due to its hilly geographical conditions and high rainfall intensity. This study aims to strengthen community capacity in disaster preparedness through collaborative socialization with the Wonosobo Regional Disaster Management Agency (BPBD). The method employed was Participatory Action Research (PAR) using the Asset-Based

Community Development (ABCD) approach and Community- Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) strategy. The program consisted of social asset mapping, the development of community-based hazard maps, evacuation route planning, and emergency response simulations. The results indicated a significant improvement in community knowledge and skills regarding disaster mitigation, along with the commitment of village officials to establish a local volunteer team for disaster preparedness. Collaboration with BPBD not only enhanced the legitimacy of the program but also opened opportunities for its integration into village development planning documents. In conclusion, this initiative has not only increased community preparedness but also fostered a disaster-aware culture that serves as the foundation for building a sustainable and independent village-level emergency response system.

Keyword : disaster mitigation, community empowerment, landslide, ABCD, BPBD

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis dan geologisnya yang kompleks, termasuk keberadaan gunung api aktif, curah hujan tinggi, serta topografi perbukitan yang rentan mengalami pergerakan tanah. Salah satu bencana yang sering terjadi dan menimbulkan dampak serius adalah tanah longsor yang merupakan penyebab tertinggi kedua kerusakan infrastruktur dan korban jiwa setelah banjir. Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat atas dalam jumlah kejadian tanah longsor, dan Kabupaten Wonosobo termasuk dalam kategori daerah dengan risiko tinggi¹.

Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, merupakan salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang memiliki karakteristik geografis perbukitan dengan kemiringan lereng cukup curam. Wilayah Derongisor telah mengalami lebih dari 4 kejadian longsor dalam dua tahun terakhir yang mengakibatkan terganggunya akses jalan desa, rusaknya lahan pertanian, dan kerusakan ringan pada beberapa rumah warga.

Hasil observasi awal anggota KKN Kelompok 89 UIN Saizu Purwokerto, SGD, UA dengan warga dan perangkat desa, mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki kerentanan secara pengetahuan dan kesiapsiagaan. Banyak warga yang belum memahami faktor-faktor penyebab longsor, tanda-tanda awal, ataupun langkah-langkah evakuasi. Selain itu, belum terdapat sistem informasi atau jalur evakuasi darurat yang jelas di desa. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi berbasis edukasi kebencanaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Namun, selain peta masalah tersebut, Desa Derongisor juga memiliki aset sosial yang signifikan, seperti budaya gotong royong yang masih kuat, keberadaan tokoh masyarakat yang dihormati, dan kelompok pemuda yang cukup aktif dalam kegiatan desa. Melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), potensi ini menjadi modal penting untuk membangun ketangguhan komunitas (*community resilience*) terhadap bencana. Pemetaan aset sosial ini menjadi landasan untuk merancang program berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan menurunkan risiko dampak bencana tanah longsor, kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan strategi *Community-Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR). Metode ini mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Sosialisasi tidak dilakukan secara *top-down*, melainkan melalui pendekatan dialogis dengan melibatkan berbagai unsur komunitas lokal.

Sosialisasi mitigasi bencana dilakukan secara kolaboratif dengan BPBD Wonosobo sebagai mitra strategis. BPBD berperan dalam memberikan materi teknis dan fasilitasi pelatihan, sementara anggota KKN Kelompok 89 UIN Saizu Purwokerto, SGD, UA dan perangkat desa mengelola aspek sosial dan logistik. Materi yang disampaikan meliputi pengkajian risiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana mitigasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, dan pengembangan tim relawan desa atau kelurahan.

Kegiatan ini memiliki signifikansi *problem solving* yang tinggi, karena menasar pada persoalan krusial di masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan minimnya sistem kesiapsiagaan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan langkah mitigasi, diharapkan dapat mengurangi dampak longsor secara signifikan, baik dari segi korban jiwa maupun kerugian materiil. Lebih jauh, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk budaya sadar bencana (*disaster-aware culture*) yang menjadi kunci keberlanjutan pembangunan desa.

Dari sisi kemitraan, keterlibatan BPBD Wonosobo menjadi sangat strategis karena memperkuat legitimasi kegiatan di tingkat daerah. Selain itu, sinergi antara BPBD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki dimensi kolaboratif yang kuat. Kemitraan ini tidak hanya mendukung pelaksanaan kegiatan, tetapi juga membuka peluang bagi keberlanjutan program edukasi kebencanaan di masa mendatang, termasuk kemungkinan integrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Metode

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) berfokus pada pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai potensi unggulan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian komunitas. Masyarakat yang berdaya ditandai oleh kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sendiri serta menyelesaikan persoalan secara mandiri. Esensi dari pemberdayaan terletak pada tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap permasalahan yang dihadapi, serta kemampuan untuk mengatasinya dengan sumber daya dan potensi yang telah ada di lingkungan mereka². Dalam konteks ini, aset tidak hanya merujuk pada kekayaan materi, tetapi juga mencakup berbagai sumber daya yang ada di dalam diri individu dan kelompok, seperti kecerdasan, rasa kepedulian sosial, semangat gotong royong, kebersamaan, serta nilai-nilai sosial lainnya yang memperkuat solidaritas masyarakat. Selain itu, aset juga meliputi sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitar, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang program pemberdayaan.

Dengan memanfaatkan aset-aset tersebut secara optimal, pendekatan ABCD bertujuan untuk menggerakkan masyarakat sebagai agen perubahan yang aktif dan mandiri dalam proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga pada kapasitas internal komunitas yang dikembangkan secara berkelanjutan.

Melalui pengembangan masyarakat berbasis aset ini, diharapkan masyarakat dapat membangun kemandirian secara berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Pendekatan ini tidak hanya menanggulangi masalah secara temporer, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat agar masyarakat mampu menghadapi tantangan di masa depan dengan sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki sendiri.

Proses pemberdayaan berbasis ABCD ini berjalan melalui lima tahapan utama, yaitu: *Discovery, Dream, Define, Design, dan Destiny*. Tahapan-tahapan ini saling berkaitan dan membentuk siklus pengembangan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Tahap pertama, *Discovery*, adalah proses identifikasi dan penggalian aset-aset lokal yang dimiliki masyarakat Desa Derongisor. Anggota KKN melakukan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok untuk menemukan potensi yang ada, baik berupa sumber daya manusia seperti semangat gotong royong dan keterlibatan tokoh masyarakat, kelembagaan desa, hingga aset fisik seperti balai desa dan lahan terbuka yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor.



Gambar 1. Diskusi dan Wawancara Bersama Perangkat Desa Derongisor

Setelah aset tersebut ditemukan, tahap berikutnya adalah *Dream*, di mana masyarakat diajak untuk membayangkan kondisi ideal desa mereka dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor. Pemerintah desa mengungkapkan harapan mereka agar seluruh warga memiliki pengetahuan yang baik tentang tanda-tanda longsor, terdapat jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses, serta informasi kebencanaan yang tersampaikan dengan efektif ke seluruh lapisan masyarakat. Tahap ini penting untuk membangun visi bersama yang menjadi motivasi dan arah perubahan.

Kemudian, dalam tahap *Define*, hasil penemuan aset dan impian masyarakat dirumuskan menjadi fokus program yang realistis dan sesuai prioritas. Melalui hasil

diskusi dengan pemerintah desa Derongisor, ditentukan bahwa kegiatan utama pengabdian adalah meningkatkan literasi kebencanaan warga melalui sosialisasi dan edukasi, serta merancang jalur evakuasi, dan diharapkan dapat terbentuk tim relawan mandiri di desa. Fokus ini dipilih agar kegiatan pengabdian tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kapasitas lokal.

Selanjutnya, tahap *Design* merupakan perencanaan aksi yang disusun bersama antara anggota KKN, perangkat desa, dan mitra teknis yaitu BPBD Wonosobo. Rencana kegiatan mencakup sosialisasi mitigasi tanah longsor, pengkajian risiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana mitigasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, dan pengembangan tim relawan desa atau kelurahan. Semua kegiatan dirancang agar mudah dipahami dan dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada.

Tahap terakhir adalah *Destiny*, yaitu pelaksanaan program sekaligus pembentukan komitmen keberlanjutan. Kegiatan sosialisasi dan simulasi evakuasi dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa. Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi bersama untuk mengukur efektivitas program dan mendapatkan umpan balik. Selain itu, masyarakat didorong untuk melanjutkan kegiatan edukasi secara mandiri dan segera membentuk tim relawan desa.

Hasil

Dalam diskusi yang dilakukan bersama perangkat Desa Derongisor, ditemukan bahwa desa tersebut merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana tanah longsor, namun hingga saat ini belum memiliki sistem penanganan bencana yang terstruktur, termasuk belum terbentuknya tim relawan maupun tim evakuasi di tingkat desa. Hal ini menjadi persoalan yang cukup serius, terlebih mengingat pada tahun sebelumnya telah terjadi peristiwa tanah longsor yang mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia. Peristiwa tersebut menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk mulai menyadari pentingnya penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk pengadaan tim relawan lokal yang dapat merespons keadaan darurat secara mandiri dan cepat.

Meski keinginan untuk membentuk tim relawan sudah mulai muncul, perangkat desa masih mengalami kebingungan dalam menentukan langkah awal yang harus diambil. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya akses informasi serta kurangnya komunikasi teknis di antara unsur-unsur pemerintahan desa. Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami konsep mitigasi bencana dan langkah-langkah praktis yang dapat mereka lakukan secara kolektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pendampingan dari pihak yang berkompeten dalam manajemen kebencanaan.

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan tersebut, anggota KKN menyarankan agar pemerintah desa melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo sebagai mitra strategis. BPBD diharapkan dapat menjadi narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi kebencanaan yang tidak hanya membahas teori dasar tentang mitigasi bencana, tetapi juga menyentuh aspek teknis seperti pengkajian risiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, perencanaan jalur evakuasi, serta tahap awal pembentukan tim relawan berbasis desa. Salah satu

output penting dari kegiatan ini adalah penyusunan peta rawan bencana berbasis dusun, yang dirancang secara partisipatif oleh warga desa. Dalam kegiatan ini, peserta sosialisasi terdiri dari perangkat desa, anggota Linmas, ketua RW, ketua RT, serta para pemuda desa yang dianggap sebagai elemen strategis dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat lokal

Sosialisasi dilaksanakan dengan alur sistematis. Sesi pertama diisi dengan pemaparan materi dasar oleh narasumber dari BPBD, yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar mitigasi bencana serta langkah konkret yang bisa dilakukan di tingkat desa. Setelah sesi materi, peserta sosialisasi dibagi menjadi empat kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada di Desa Derongisor. Setiap kelompok difasilitasi oleh anggota KKN untuk melakukan pemetaan wilayahnya masing-masing secara manual menggunakan kertas plano dan spidol warna- warni. Warga menggambar peta sederhana yang memuat unsur-unsur penting seperti jalur jalan, tanah lapang, rumah ibadah (mushola), rumah tokoh masyarakat, kebun, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya.

Setelah penyusunan peta, masing-masing kelompok mendiskusikan dan menentukan titik-titik evakuasi serta jalur evakuasi yang paling memungkinkan dan aman apabila terjadi bencana. Proses ini dikawal langsung oleh tim BPBD agar hasilnya akurat dan sesuai dengan standar penanggulangan bencana. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi masyarakat, tetapi juga memantik partisipasi aktif mereka dalam mengenali lingkungan dan merencanakan perlindungan secara kolektif.

Untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan ini, tim pengabdian menyerahkan proses tindak lanjut sepenuhnya kepada pihak desa. Nomor kontak narasumber dari BPBD Wonosobo diberikan kepada perangkat desa agar dapat digunakan dalam mengadakan pelatihan lanjutan, termasuk tahapan praktek pembentukan tim relawan. Peta-peta rawan bencana yang telah disusun oleh warga dari masing-masing dusun diharapkan dapat disatukan dan dijadikan sebagai acuan awal dalam penyusunan rencana evakuasi darurat di tingkat desa secara keseluruhan.



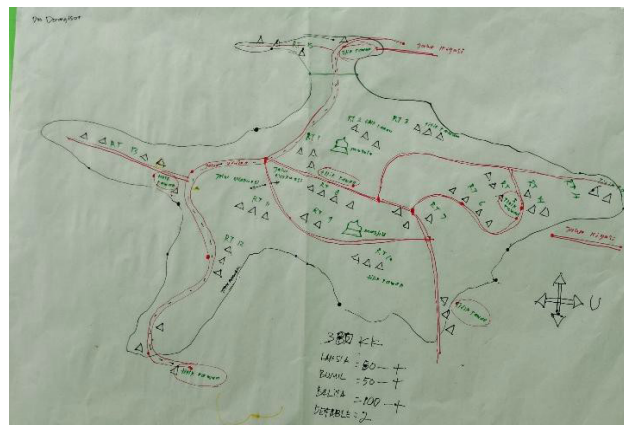
Gambar 2. Pematerian BPBD



Gambar 3. Pembuatan Peta Rawan Bencana



Gambar 4. Pemaparan Peta Rawan Bencana Setiap Dusun



Gambar 5. Contoh Peta Rawan Bencana

Pembahasan

Manajemen bencana semestinya didasarkan pada pendekatan berbasis risiko, yang mengutamakan aspek mitigasi dibandingkan penanganan pascabencana. Paradigma mitigasi dalam konteks penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian upaya sistematis untuk mengenali wilayah-wilayah rawan bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana (PRB), mitigasi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rentan guna mengurangi dampak dari potensi ancaman yang ada³. Implementasi mitigasi dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti

perubahan perilaku masyarakat yang rentan, penataan kawasan permukiman, penerapan regulasi teknis bangunan yang tahan terhadap bencana, serta pengembangan tata ruang yang mengintegrasikan perspektif mitigasi sebagai prinsip utama dalam perencanaannya.

Dalam konteks bencana tanah longsor, upaya mitigasi menjadi sangat relevan mengingat karakteristik geografis dan geologis wilayah tertentu yang menjadikannya rentan terhadap pergerakan massa tanah. Lereng rawan longsor umumnya dipengaruhi oleh dua kategori penyebab, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat fisik dan mekanik dari material penyusun lereng, sedangkan faktor eksternal mencakup pelapukan, erosi, aktivitas seismik, dan perubahan kadar air tanah akibat curah hujan tinggi. Curah hujan yang intens dapat meningkatkan kadar air tanah, menurunkan kekuatan geser, dan meningkatkan tekanan pori, yang secara keseluruhan berdampak pada penurunan stabilitas lereng. Bahkan, dalam kasus tertentu, erosi bawah permukaan (piping) dapat menyebabkan partikel halus tanah terbawa arus air, memperlemah struktur tanah dan memicu longsor secara tiba-tiba. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi harus mempertimbangkan pemetaan wilayah rawan dan identifikasi faktor risiko secara menyeluruh⁴.

Berdasarkan hasil kajian studi kasus, upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dilaksanakan melalui pendekatan struktural maupun non-struktural, yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang ada di suatu wilayah⁵. Mitigasi tersebut mencakup langkah-langkah preventif sebelum bencana terjadi, tindakan saat kejadian berlangsung, serta penanganan dampak pascabencana. Strategi mitigasi tanah longsor dilakukan melalui analisis risiko kawasan, dengan fokus pada pengurangan tingkat ancaman dan kerentanan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pendidikan menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya mitigasi jangka panjang. Efektivitas pendidikan mitigasi bencana, khususnya di lingkungan satuan pendidikan, sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengintegrasikan isu-isu lokal ke dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Pendidikan mitigasi bencana biasanya dibagi ke dalam tiga tahapan: sebelum bencana (preventif dan kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat dan penyelamatan diri), dan pascabencana (evaluasi serta penguatan sistem peringatan dini). Ketiga tahap ini bertujuan membentuk sikap dan keterampilan tanggap bencana sejak usia dini sebagai bagian dari pembangunan budaya siaga bencana⁶.

Sebagai implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, kegiatan sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor yang dilaksanakan di Desa Derongisor, Kecamatan Mojotengah, menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan partisipatif dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam penguatan kesiapsiagaan komunitas. Melibatkan perangkat desa, Linmas, dan pemuda setempat, kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki potensi sebagai aset sosial yang sangat berharga. Dalam kegiatan ini, warga berperan aktif tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai perancang peta rawan bencana di lingkungan dusun masing-masing.

Dari hasil kegiatan, warga dari empat dusun berhasil menyusun peta rawan bencana berbasis komunitas. Proses ini tidak hanya menambah pemahaman warga terhadap potensi risiko, tetapi juga melatih keterampilan analitis dan pemetaan spasial sederhana.

Warga secara mandiri dapat mengidentifikasi zona rawan, jalur aman, serta titik evakuasi yang relevan dengan kondisi geografis dusunnya masing-masing. Ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menghasilkan transfer pengetahuan horizontal, dari warga untuk warga, yang sering kali lebih berdampak dibandingkan pendekatan top-down.

Keterlibatan BPBD Kabupaten Wonosobo dalam kegiatan ini juga memperkuat keberhasilan program. BPBD bukan hanya berperan sebagai pemberi materi, tetapi juga menjadi mitra teknis yang mendampingi warga dalam mengidentifikasi risiko, menyusun strategi mitigasi, serta mengarahkan proses penyusunan peta evakuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan antara masyarakat, lembaga akademik, dan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam keberhasilan program pengabdian masyarakat.

Lebih dari itu, kegiatan ini memberikan efek jangka panjang berupa meningkatnya kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya mitigasi bencana. Komitmen perangkat desa untuk melanjutkan koordinasi dengan BPBD dan mengembangkan hasil pemetaan menjadi dokumen kebencanaan desa menunjukkan adanya perubahan sosial yang mulai terbentuk. Warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang merupakan inti dari konsep *community empowerment*.

Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ABCD bukan hanya memungkinkan tercapainya hasil jangka pendek berupa pemahaman dan dokumen peta bencana, tetapi juga menciptakan fondasi bagi pengembangan sistem tanggap darurat yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat desa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Derongisor membuktikan bahwa pemberdayaan berbasis aset dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor. Melalui kolaborasi antara BPBD Wonosobo, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda, warga berhasil menyusun peta rawan bencana, merancang jalur evakuasi, serta meningkatkan pemahaman terhadap langkah-langkah mitigasi. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya memperkuat pengetahuan, tetapi juga membangun budaya sadar bencana yang berorientasi pada kemandirian komunitas. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem tanggap darurat desa yang berkelanjutan dan dapat dijadikan model pengembangan mitigasi bencana berbasis komunitas di wilayah lain yang memiliki risiko serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukido, Rosdalina, and Muhammad Azhar Mushlihin. "Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Gangga II Dengan Menggunakan Metode ABCD." *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 45–56.
- Muhamad, Nabilah. "Ini Provinsi Dengan Tanah Longsor Terbanyak 10 Tahun Terakhir." *databoks*, 2024.
- <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/42f148d4c90f7c2/ini-provinsi-dengan-tanah-longsor-terbanyak-10-tahun-terakhir>.
- Nurjanah, Siti, and Enggal Mursalin. "Pentingnya Mitigasi Bencana Alam Longsor Lahan: Studi Persepsi Mahasiswa." *Jurnal Basicedu* 6, no. 1 (2021): 515–23. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.1937>.
- Wekke, Ismail Suardi. *Mitigasi Bencana*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Zakaria, Z. "Model Starlet, Suatu Usulan Untuk Mitigasi Bencana Longsor Dengan Pendekatan Genetika Wilayah (Studi Kasus: Longsoran Citatah, Padalarang, Jawa)." *Indonesian Journal on Geoscience* 5, no. 2 (2010): 93–112. <https://doi.org/10.17014/ijog.v5i2.95>.
- Zulfa Vira Ananda, Widyasamratri Hasti, and Kautsary Jamilla. "MITIGASI BENCANA BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TANAH LONGSOR Kasus : Lereng Gunung Wilis Kabupaten Nganjuk, Desa Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Dan Desa Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul." *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 2 (2022): 154–69.